



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

(D P M P T S P)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) tahun anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Sungai Raya, 31 Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya



MARIA AGUSTINA, SE, M.Si
NIP. 19710816 199603 2 002

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2021 (LRA)

NERACA PER 31 DESEMBER 2021

LAPORAN OPERASIONAL (LO) PER 31 DESEMBER 2021

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) PER 31 DESEMBER 2020

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
	1.3 Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan.....	5
Bab II	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.....	6
	2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.....	6
	2.2. Hambatan dan Kendala.....	13
Bab III	Kebijakan Akuntansi.....	15
	3.1. Entitas Akuntansi (Saluan Kerja Perangkat Daerah).....	15
	3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
	3.3. Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
Bab IV	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	17
	4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	17
	4.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	19
	4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO).....	22
	4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	26
Bab V	Penjelasan atas Informasi non Keuangan.....	27
	5.1. Informasi Tambahan.....	27
	5.2...Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah.....	27
Bab VI	Penutup.....	31

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	6
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2022	8
Tabel 2.3	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022	9

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022.

Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang disempurnakan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan SKPD ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, kami sampaikan. Semoga Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya bermanfaat bagi kita semua.

Sungai Raya, 31 Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,



Maria Agustina, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 08710816 199603 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN KURU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Jumlah Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
13					
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
15	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
19	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
20					

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
21	BELANJA	7.017.727.904,00	6.764.988.600,00	252.739.304,00	96,40
22	BELANJA OPERASI	6.499.664.954,00	6.276.745.850,00	222.919.104,00	96,57
23	Belanja Pegawai	3.818.515.572,00	3.682.364.117,00	136.151.455,00	96,43
24	Belanja Barang dan Jasa	2.681.149.382,00	2.594.381.733,00	86.767.649,00	96,76
25	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jumlah Belanja Operasi	6.499.664.954,00	6.276.745.850,00	222.919.104,00	96,57
30					
31	BELANJA MODAL	518.062.950,00	488.242.750,00	29.820.200,00	94,24
32	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	508.062.950,00	478.742.750,00	29.320.200,00	94,23
34	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	95,00
37	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Jumlah Belanja Modal	518.062.950,00	488.242.750,00	29.820.200,00	94,24
39					
40	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Jumlah Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
43					
44	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jumlah Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Jumlah BELANJA DAERAH	7.017.727.904,00	6.764.988.600,00	252.739.304,00	96,40
49					
50	SURPLUS / DEFISIT	(7.017.727.904,00)	(6.764.988.600,00)	(252.739.304,00)	96,40



Singaraja, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS

MARIA AGUSTINA, S.E., M.Si
197108161996032002

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAU SATU PINTU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	2022	2021
1	ASET		
2	ASET LANCAR	836.343.668,34	639.732.614,18
3	Kas dan Setara Kas	13.430.620,00	42.543.372,51
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Dana BOS	0,00	0,00
9	Kas Dana Koperasi (sub) FKTP	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	0,00	0,00
11	Setara Kas	0,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
13	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sub	0,00	0,00
18	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
20	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
21	Piutang Lainnya	0,00	0,00
22	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
23	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
24	Persediaan	0,00	30.710.387,51
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	13.430.620,00	11.832.990,00
26	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
27	Investasi kepada BUMN	0,00	0,00
28	Investasi pada BUMD	0,00	0,00
29	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
31	Dana Bergulir	0,00	0,00
32	Investasi Permanen	0,00	0,00
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
34	Investasi-Pembelian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
35			
36			
37	ASET TETAP	797.142.215,00	530.860.075,00
38	Tanah	0,00	0,00
39	Peralatan dan Mesin	3.321.237.730,00	2.628.459.620,00
40	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
41	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
42	Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	0,00
43	Kontraksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
44	Akumulasi Penyusutan	(2.333.595.515,00)	(2.097.599.605,00)
45			
46	DANA CADANGAN	0,00	0,00
47	Dana Cadangan	0,00	0,00
48			

NO	URAIAN	2022	2021
49	ASET LAINNYA	75.770.833,34	66.329.166,67
50	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
51	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
52	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
53	Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00
54	Aset Tidak Berwujud	634.182.000,00	96.400.000,00
55	Aset Lain-lain	0,00	0,00
56	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(558.411.166,66)	(30.070.833,33)
57	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
58	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
59			
60	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	886.343.668,34	639.732.614,18
61	KEWAJIBAN	0,00	0,00
62	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
63	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
64	Utang Bunga	0,00	0,00
65	Utang Pinjaman jangka Pendek	0,00	0,00
66	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
67	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
68	Utang Belanja	0,00	0,00
69	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
71	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
72	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
73	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
74	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
75	Premium(Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
76	EKUITAS	886.343.668,34	639.732.614,18

Sungai Raya, 31 Desember 2022
 KEPALA DINAS

 MARIA AGUSTINA, S.E., M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	PENDAPATAN	17.528.500,00	0,00	17.528.500,00	0,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus-non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat Transfer - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
23					
24	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
29		0,00	0,00	0,00	0,00
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Dana Darurat	17.528.500,00	0,00	17.528.500,00	0,00
33	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	17.528.500,00	0,00	17.528.500,00	0,00
35	JUMLAH PENDAPATAN	17.528.500,00	0,00	17.528.500,00	0,00
36		17.528.500,00	0,00	17.528.500,00	0,00
37	BEBAN				
38	BEBAN OPERASI	6.515.906.045,84	6.530.586.152,49	3.319.893,35	100,00
39	Beban Pegawai	6.274.351.802,51	4.761.856.633,49	1.512.495.169,02	131,76
40	Beban Barang dan Jasa	3.082.364.117,00	2.979.266.767,00	703.097.350,00	123,60
41	Beban Bunga	2.590.577.685,51	1.782.589.866,49	807.987.819,02	145,33
42	Beban Subs-sidi	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	2022	2021	Kenalkan (Perubahan)	%
45	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Beban Lain-lain	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00
47	Jumlah Beban Operasi	6.274.151.802,51	4.764.856.633,49	1.512.495.169,02	131,79
48					
49	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	261.554.243,33	172.077.946,00	89.476.297,33	152,00
50	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	235.995.910,00	147.977.946,00	88.017.964,00	159,48
51	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Beban Penyusutan Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25.558.333,33	24.100.000,00	1.458.333,33	106,95
56	Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi	261.554.243,33	172.077.946,00	89.476.297,33	152,00
57					
58	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
62					
63	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
66	JUMLAH BEBAN	6.535.906.045,84	4.933.934.579,49	1.601.971.466,35	152,47
67					
68	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.518.377.545,84)	(4.933.934.579,49)	(1.584.442.966,35)	0,00
69					
70	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
76					
77	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Defisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	1.596.651.573,00	(1.596.651.573,00)	0,00
81	Jumlah Defisit Non Operasional	0,00	1.596.651.573,00	(1.596.651.573,00)	0,00
82	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(1.596.651.573,00)	1.596.651.573,00	0,00
83					
84	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6.518.377.545,84)	(4.933.934.579,49)	(1.584.442.966,35)	0,00
85					
86	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
90					
91	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
94	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
95					

NO	URAIAN	2022	2021	Kenalkan (Penurunan)	%
96	SURPLUS/ DEFISIT - LO	(6.518.377.545,84)	(6.530.586.152,49)	12.208.606,65	0,00

Sungai Raya, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS

MARIA AGESTINA, S.E., M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	(9.383.268.197,82)	(2.852.682.045,33)
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.518.377.545,84)	(6.530.586.152,49)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
6	LAIN LAIN	0,00	0,00
7	EKUITAS AKHIR	(15.901.645.743,66)	(9.383.268.197,82)

Sungai Raya, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS

MARIA AGUSTINA, S.E., M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN REALISASI SEMESTER KEDUA APBD DAN PROGNOSIS
D BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Pemerintahan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Unit Organisasi : 2.18.09.000.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. Satu Pintu.

KD REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI S/D SEMESTER KEDUA	DISA ANGGARAN	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.00	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.00.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.00.03	Pajak Jasman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rantai Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.03	Pajak Kalantang dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.09	Pajak Panji Pias, Refleksi Mendi Uap/Sisa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/VideoWall/Signage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Qhashtakan Sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14.03	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14.00	Pajak Tangkai Liat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.16	BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Keselahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Pembersihan/Kabersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO REK	URAIAN	JMLAH ANGGARAN	REALISASI SD BERSIFTER KEDUA	OPSA ANGGARAN	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5	6	7
4.1.02.01.1	Retribusi Pelayanan Terat-Tera Uang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.0	Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kelembahanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Penjualan Produk hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Perpanjangan Izin Mengerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persewaan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Waik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.07	Pencantolan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Janjikan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KD REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI MD BERSICUT MEDIA	URSA ANGGARAN	PERSENTASE	%
1	2	3	4	5	6	7
4.2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	7.017.727.904,00	6.764.969.990,00	252.739.304,00	252.739.304,00	86,40
5.1	BELANJA OPERASI	6.499.664.954,00	6.276.745.058,00	222.919.104,00	222.919.104,00	86,57
5.1.01	Belanja Pegawai	3.816.518.572,00	3.862.384.117,00	438.151.458,00	438.151.458,00	96,43
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.906.813.434,00	1.759.146.279,00	47.667.155,00	47.667.155,00	97,35
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.259.518.600,00	1.233.597.200,00	25.921.400,00	25.921.400,00	97,64
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	128.725.728,00	122.823.758,00	3.901.968,00	3.901.968,00	86,92
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	108.430.000,00	108.430.000,00	0,00	0,00	100,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	78.840.000,00	75.600.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	96,89
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.615.000,00	18.000.000,00	555.000,00	555.000,00	97,02
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.968.580,00	73.361.460,00	2.607.120,00	2.607.120,00	96,57
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.867.853,00	3.867.853,00	0,00	0,00	100,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gap ASN	17.899,00	17.149,00	750,00	750,00	95,81
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	317.046.460,00	312.899.838,00	4.146.622,00	4.146.622,00	96,46
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.752.543,00	2.685.114,00	68.429,00	68.429,00	97,59
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.007.203,00	7.802.907,00	199.296,00	199.296,00	87,51
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Sumbangan Peserta Tunjangan Perumahan Rakyat ASN	7.028.570,00	0,00	7.028.570,00	7.028.570,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.011.702.138,00	1.823.217.838,00	88.484.300,00	88.484.300,00	86,60
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Bahan Kerja ASN	2.011.702.138,00	1.923.217.838,00	88.484.300,00	88.484.300,00	55,60
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungulan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas insentif Pemungulan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TAG) PNSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tambahan) Guru PNSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SDU SEMESTER KE-1	85% ANGGARAN	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Rokok DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Lain-lain Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDHVAKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDHVAKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDHVAKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.681.149.383,00	2.664.381.733,00	66.767.649,00	66.767.649,00	96,76
5.1.02.01	Belanja Barang	769.124.724,00	764.303.834,00	4.820.890,00	4.820.890,00	98,37
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	769.124.724,00	764.303.834,00	4.820.890,00	4.820.890,00	98,37
6.1.02.02	Belanja Jasa	1.338.406.958,00	1.260.185.163,00	79.220.895,00	79.220.895,00	94,16
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.281.606.154,00	1.188.515.027,00	73.090.837,00	73.090.837,00	94,21
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.999.600,00	37.519.536,00	2.480.064,00	2.480.064,00	93,80
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Perawatan dan Mobil	31.800.000,00	29.150.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	91,67
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Koreksi/kean Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	126.182.600,00	125.529.313,00	653.287,00	653.287,00	99,48
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	126.182.600,00	125.529.313,00	653.287,00	653.287,00	99,48
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Migasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	447.436.000,00	444.363.423,00	3.072.577,00	3.072.577,00	99,31
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam negeri	447.436.000,00	444.363.423,00	3.072.577,00	3.072.577,00	99,31
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KD REK	UJIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SDG SEMESTER KEDUA	UDA ANGGARAN	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Anak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.05	Belanja Barang dan Jasa BUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.08	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.09	Belanja Barang dan Jasa BLUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-GUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Berbentuk Badan/Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial, Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang dicairkan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	518.062.950,00	489.242.750,00	29.820.200,00	29.820.200,00	94,24
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Perair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	508.062.850,00	478.742.750,00	29.820.200,00	29.820.200,00	94,23
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	333.907.200,00	312.200.000,00	21.707.200,00	21.707.200,00	83,50
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	333.907.200,00	312.200.000,00	21.707.200,00	21.707.200,00	93,30
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.118.720,00	21.800.000,00	218.720,00	218.720,00	99,01
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	16.371.000,00	16.250.000,00	71.100,00	71.100,00	99,56
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.797.820,00	5.650.000,00	147.820,00	147.820,00	97,45
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapac Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	47.948.850,00	43.389.000,00	4.559.850,00	4.559.850,00	95,08
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	47.948.850,00	43.389.000,00	4.559.850,00	4.559.850,00	95,45

KD REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI S/D SEMESTER KEDUA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	81.588.980,00	78.853.750,00	2.735.230,00	2.735.230,00	96,65
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	73.458.000,00	70.753.750,00	2.704.250,00	2.704.250,00	96,32
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.130.980,00	8.100.000,00	30.980,00	30.980,00	99,62
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	22.500.000,00	22.400.000,00	100.000,00	100.000,00	99,56
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	22.500.000,00	22.400.000,00	100.000,00	100.000,00	99,56
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	500.000,00	95,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	500.000,00	95,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	500.000,00	95,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KD REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI S/D SEMESTER KEDUA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	7.017.727.904,00	6.764.988.600,00	252.739.304,00	252.739.304,00	96,40
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.017.727.904,00)	(6.764.988.600,00)	(252.739.304,00)	(252.739.304,00)	96,40
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.03.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(7.017.727.904,00)	(6.764.988.600,00)	(252.739.304,00)	(252.739.304,00)	0,00

Kepala Dinas
31 Desember 2022



MARIA AGUSTINA, S.E., M.Si
NIP. 197408161996032002



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR ASET TETAP
ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022
PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	634.182.000,00
	ASET TIDAK BERWUJUD	9	634.182.000,00
	- Software	8	584.682.000,00
	- Software Lainnya	1	49.500.000,00
TOTAL		9	634.182.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN

Sampai dengan 31-Desember-2022

Bidang : Bidang Keperdukolaan
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU 31-Des-2022
				Semester I	Semester II		
1. Aset Tetap							
2	PERALATAN MESIN	3.130.737,730,00	2.097.599,605,00	87.433.853,00	148.562.057,00	2.333.595.515,00	787.142.215,00
5	ASET TETAP LAINNYA	3.121.237,730,00 9.500,000,00	2.097.599,605,00 0,00	87.433.853,00 0,00	148.562.057,00 0,00	2.333.595.515,00 0,00	787.642.215,00 9.500,000,00
JUMLAH		3.130.737,730,00	2.097.599,605,00	87.433.853,00	148.562.057,00	2.333.595.515,00	787.142.215,00

Handwritten notes and calculations in the table area:

- Handwritten "176013.535" with an arrow pointing to the "AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022" column for "PERALATAN MESIN".
- Handwritten "95305.715" with an arrow pointing to the "NILAI BUKU 31-Des-2022" column for "PERALATAN MESIN".
- Other faint handwritten numbers and scribbles are visible in the background.



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASSET	NO. REG	NAMA ASSET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. PERALATAN DAN MESIN												
					826.628.381,00			410.617.962,00	44.953.892,00	59.521.272,00	525.093.126,00	301.535.255,00
1	1.3.2.10.1.2.1	7	P.C UNK	5	2010	7.110.000,00	0	0	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00
2	1.3.2.10.1.2.1	8	P.C UNK	12	2010	7.441.200,00	0	0	0,00	0,00	7.441.200,00	0,00
3	1.3.2.10.1.2.1	14	P.C UNK	12	2010	7.110.000,00	0	0	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00
4	1.3.2.10.1.2.1	16	P.C UNK	12	2010	7.110.000,00	0	0	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00
5	1.3.2.10.1.2.1	24	P.C UNK	12	2011	7.130.000,00	0	0	0,00	0,00	7.130.000,00	0,00
6	1.3.2.10.1.2.1	25	P.C UNK	12	2011	7.130.000,00	0	0	0,00	0,00	7.130.000,00	0,00
7	1.3.2.10.1.2.1	26	P.C UNK	8	2012	24.950.000,00	0	0	0,00	0,00	24.950.000,00	0,00
8	1.3.2.10.1.2.1	28	P.C UNK	8	2012	7.500.000,00	0	0	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
9	1.3.2.10.1.2.1	30	P.C UNK	10	2014	14.975.000,00	0	0	0,00	0,00	14.975.000,00	0,00
10	1.3.2.10.1.2.1	32	P.C UNK	2	2015	14.975.000,00	0	0	0,00	0,00	14.975.000,00	0,00
11	1.3.2.10.1.2.1	34	P.C UNK	2	2015	14.975.000,00	0	0	0,00	0,00	14.975.000,00	0,00
12	1.3.2.10.1.2.1	35	P.C UNK	2	2015	14.975.000,00	0	0	0,00	0,00	14.975.000,00	0,00
13	1.3.2.10.1.2.1	37	P.C UNK	11	2012	13.189.175,00	0	0	0,00	0,00	13.189.175,00	0,00
14	1.3.2.10.1.2.1	38	P.C UNK	11	2012	13.189.175,00	0	0	0,00	0,00	13.189.175,00	0,00
15	1.3.2.10.1.2.1	40	P.C UNK	3	2017	8.200.000,00	0	0	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00
16	1.3.2.10.1.2.1	41	P.C UNK	3	2017	8.200.000,00	0	0	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00
17	1.3.2.10.1.2.1	43	P.C UNK	3	2017	7.926.667,00	0	0	0,00	0,00	7.926.667,00	0,00
18	1.3.2.10.1.2.1	44	P.C UNK	12	2018	16.250.000,00	0	11	1.625.000,00	1.625.000,00	13.270.833,00	2.979.167,00
19	1.3.2.10.1.2.1	45	P.C UNK	12	2018	16.250.000,00	0	11	1.625.000,00	1.625.000,00	13.270.833,00	2.979.167,00
20	1.3.2.10.1.2.1	46	P.C UNK	10	2014	13.475.000,00	0	0	0,00	0,00	13.475.000,00	0,00
21	1.3.2.10.1.2.1	47	P.C UNK	4	2013	7.674.700,00	0	0	0,00	0,00	7.674.700,00	0,00
22	1.3.2.10.1.2.1	48	P.C UNK	4	2013	7.469.000,00	0	0	0,00	0,00	7.469.000,00	0,00
23	1.3.2.10.1.2.1	49	P.C UNK	4	2013	7.469.000,00	0	0	0,00	0,00	7.469.000,00	0,00

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Halaman 1 dari 3



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Keperluan
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1-Jan-2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
24	1.3.2.10.1.2.1	50	P.C Unit	6 2019	15.982.920,00	1	5	8.257.842,00	1.598.292,00	1.598.292,00	11.454.426,00	4.528.494,00
25	1.3.2.10.1.2.1	51	P.C Unit	6 2019	15.982.920,00	1	5	8.257.842,00	1.598.292,00	1.598.292,00	11.454.426,00	4.528.494,00
26	1.3.2.10.1.2.1	33	P.C Unit	12 2021	12.950.121,00	3	11	0,00	0,00	2.805.860,00	2.805.860,00	10.144.261,00
27	1.3.2.10.1.2.2	3	Lap Top	6 2010	11.480.000,00	0	0	11.480.000,00	0,00	0,00	11.480.000,00	0,00
28	1.3.2.10.1.2.2	7	Lap Top	8 2012	4.975.000,00	0	0	4.975.000,00	0,00	0,00	4.975.000,00	0,00
29	1.3.2.10.1.2.2	8	Lap Top	3 2017	6.600.000,00	0	0	6.380.000,00	220.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00
30	1.3.2.10.1.2.2	9	Lap Top	11 2017	6.650.000,00	0	0	5.541.667,00	665.000,00	0,00	6.650.000,00	0,00
31	1.3.2.10.1.2.2	10	Lap Top	11 2017	6.650.000,00	0	0	5.541.667,00	665.000,00	0,00	6.650.000,00	0,00
32	1.3.2.10.1.2.2	11	Lap Top	4 2020	14.049.000,00	2	3	4.917.150,00	1.404.900,00	1.404.900,00	7.726.599,00	6.322.090,00
33	1.3.2.10.1.2.2	12	Lap Top	4 2020	14.049.000,00	2	3	4.917.150,00	1.404.900,00	1.404.900,00	7.726.599,00	6.322.090,00
34	1.3.2.10.1.2.2	13	Lap Top	4 2020	14.049.000,00	2	3	4.917.150,00	1.404.900,00	1.404.900,00	7.726.599,00	6.322.090,00
35	1.3.2.10.1.2.2	14	Lap Top	4 2020	14.049.000,00	2	3	4.917.150,00	1.404.900,00	1.404.900,00	7.726.599,00	6.322.090,00
36	1.3.2.10.1.2.2	15	Lap Top	11 2020	23.650.000,00	2	10	4.917.150,00	1.404.900,00	1.404.900,00	7.726.599,00	6.322.090,00
37	1.3.2.10.1.2.2	16	Lap Top	11 2020	15.000.000,00	2	10	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00
38	1.3.2.10.1.2.2	17	Lap Top	11 2020	15.000.000,00	2	10	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00
39	1.3.2.10.1.2.2	18	Lap Top	11 2020	15.000.000,00	2	10	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00
40	1.3.2.10.1.2.2	19	Lap Top	11 2020	15.000.000,00	2	10	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00
41	1.3.2.10.1.2.2	20	Lap Top	2 2021	14.495.000,00	3	1	2.657.417,00	1.449.500,00	1.449.500,00	5.556.417,00	8.938.583,00
42	1.3.2.10.1.2.2	21	Lap Top	2 2021	14.495.000,00	3	1	2.657.417,00	1.449.500,00	1.449.500,00	5.556.417,00	8.938.583,00
43	1.3.2.10.1.2.2	22	Lap Top	2 2021	14.495.000,00	3	1	2.657.417,00	1.449.500,00	1.449.500,00	5.556.417,00	8.938.583,00
44	1.3.2.10.1.2.2	23	Lap Top	2 2021	14.495.000,00	3	1	2.657.417,00	1.449.500,00	1.449.500,00	5.556.417,00	8.938.583,00
45	1.3.2.10.1.2.2	24	Lap Top	11 2021	26.487.500,00	3	10	882.917,00	2.648.750,00	2.648.750,00	6.180.417,00	20.307.083,00
46	1.3.2.10.1.2.2	25	Lap Top	11 2021	26.487.500,00	3	10	882.917,00	2.648.750,00	2.648.750,00	6.180.417,00	20.307.083,00
47	1.3.2.10.1.2.2	26	Lap Top	11 2021	26.487.500,00	3	10	882.917,00	2.648.750,00	2.648.750,00	6.180.417,00	20.307.083,00
48	1.3.2.10.1.2.2	27	Lap Top	11 2021	26.487.500,00	3	10	882.917,00	2.648.750,00	2.648.750,00	6.180.417,00	20.307.083,00

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Halaman 2 dari 3



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Keperindustrian
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
49	1.3.2.10.1.2.2	28	Lap Top	11	26.487.560,00	3	10	882.917,00	2.648.750,00	2.648.750,00	6.180.417,00	20.307.083,00
50	1.3.2.10.1.2.2	29	Lap Top	2	14.150.750,00	4	1	0,00	0,00	0,00	2.594.304,00	11.556.446,00
51	1.3.2.10.1.2.2	30	Lap Top	2	14.150.750,00	4	1	0,00	0,00	2.594.304,00	2.594.304,00	11.556.446,00
52	1.3.2.10.1.2.2	31	Lap Top	2	14.150.750,00	4	1	0,00	0,00	2.594.304,00	2.594.304,00	11.556.446,00
53	1.3.2.10.1.2.2	32	Lap Top	2	14.150.750,00	4	1	0,00	0,00	2.594.304,00	2.594.304,00	11.556.446,00
54	1.3.2.10.1.2.2	33	Lap Top	2	14.150.750,00	4	1	0,00	0,00	2.594.304,00	2.594.304,00	11.556.446,00
55	1.3.2.10.1.2.3	1	Note Book	12	11.500.000,00	0	0	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00
56	1.3.2.10.1.2.3	3	Note Book	12	11.500.000,00	0	0	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00
57	1.3.2.10.1.2.3	6	Note Book	9	14.950.000,00	0	0	14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00	0,00
58	1.3.2.10.1.2.3	7	Note Book	7	7.950.000,00	0	0	7.950.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00	0,00
59	1.3.2.10.1.2.3	8	Note Book	2	17.850.000,00	0	0	17.850.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	0,00
60	1.3.2.10.1.2.3	9	Note Book	6	14.992.920,00	1	5	7.246.342,00	1.499.292,00	1.499.292,00	10.244.806,00	4.247.994,00
61	1.3.2.10.1.2.9	1	Table PC	0	2.600.000,00	2	8	693.333,00	260.000,00	260.000,00	1.213.333,00	1.386.667,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Keperkotaan
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MAWPALAT Tahun/ bulan	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
								Semester I	Semester II		
1. PERALATAN DAN MESIN											
					228.433.477,00		147.094.575,00	9.937.315,00	11.473.072,00	168.444.966,00	59.985.511,00
1	1.3.2.10.2.3.3	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.600.000,00	0	2.513.333,00	86.667,00	0,00	2.600.000,00	0,00
2	1.3.2.10.2.3.3	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.600.000,00	0	2.513.333,00	86.667,00	0,00	2.600.000,00	0,00
3	1.3.2.10.2.3.3	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	8.809.300,00	0	8.809.300,00	0,00	0,00	8.809.300,00	0,00
4	1.3.2.10.2.3.3	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.600.000,00	0	2.513.333,00	86.667,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5	1.3.2.10.2.3.3	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.600.000,00	0	2.513.333,00	86.667,00	0,00	2.600.000,00	0,00
6	1.3.2.10.2.3.3	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.200.000,00	0	1.833.333,00	220.000,00	146.667,00	2.200.000,00	0,00
7	1.3.2.10.2.3.3	9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2.893.000,00	0	2.893.000,00	0,00	0,00	2.893.000,00	0,00
8	1.3.2.10.2.3.3	10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2.500.000,00	1	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00	750.000,00
9	1.3.2.10.2.3.3	11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2.500.000,00	1	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00	750.000,00
10	1.3.2.10.2.3.3	12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2.500.000,00	1	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00	750.000,00
11	1.3.2.10.2.3.3	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2.500.000,00	1	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00	750.000,00
12	1.3.2.10.2.3.3	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2.500.000,00	1	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00	750.000,00
13	1.3.2.10.2.3.3	37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
14	1.3.2.10.2.3.3	38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
15	1.3.2.10.2.3.3	40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
16	1.3.2.10.2.3.3	41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
17	1.3.2.10.2.3.3	43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
18	1.3.2.10.2.3.3	44	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
19	1.3.2.10.2.3.3	45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
20	1.3.2.10.2.3.3	48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
21	1.3.2.10.2.3.3	49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
22	1.3.2.10.2.3.3	54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.575.000,00	0	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00
23	1.3.2.10.2.3.3	55	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.575.000,00	0	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00
		56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.575.000,00	0	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Keperencanaan
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MAJIFAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
24	1.3.2.10.2.3.3	57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.575.000,00	0	0	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00
25	1.3.2.10.2.3.3	58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	10	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
26	1.3.2.10.2.3.3	59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	10	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
27	1.3.2.10.2.3.3	60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	10	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
28	1.3.2.10.2.3.3	61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.493.000,00	2	10	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
29	1.3.2.10.2.3.3	62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	10	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
30	1.3.2.10.2.3.3	63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	10	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
31	1.3.2.10.2.3.3	64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	10	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
32	1.3.2.10.2.3.3	65	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	10	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
33	1.3.2.10.2.3.3	66	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.787.500,00	3	2	464.583,00	278.750,00	278.750,00	1.022.083,00	1.365.417,00
34	1.3.2.10.2.3.3	67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.787.500,00	3	2	464.583,00	278.750,00	278.750,00	1.022.083,00	1.365.417,00
35	1.3.2.10.2.3.3	68	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.787.500,00	3	2	464.583,00	278.750,00	278.750,00	1.022.083,00	1.365.417,00
36	1.3.2.10.2.3.3	69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.787.500,00	3	2	464.583,00	278.750,00	278.750,00	1.022.083,00	1.365.417,00
37	1.3.2.10.2.3.3	70	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	3.010.500,00	3	10	100.350,00	301.050,00	301.050,00	702.450,00	2.308.050,00
38	1.3.2.10.2.3.3	71	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	3.010.500,00	3	10	100.350,00	301.050,00	301.050,00	702.450,00	2.308.050,00
39	1.3.2.10.2.3.3	72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	3.010.500,00	3	10	100.350,00	301.050,00	301.050,00	702.450,00	2.308.050,00
40	1.3.2.10.2.3.3	73	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	3.010.500,00	3	10	100.350,00	301.050,00	301.050,00	702.450,00	2.308.050,00
41	1.3.2.10.2.3.3	74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	3.010.500,00	3	10	100.350,00	301.050,00	301.050,00	702.450,00	2.308.050,00
42	1.3.2.10.2.3.3	75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2.795.807,00	3	11	0,00	0,00	0,00	605.758,00	2.190.049,00
43	1.3.2.10.2.3.4	1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	1.350.000,00	0	0	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
44	1.3.2.10.2.3.4	2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	1.350.000,00	0	0	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
45	1.3.2.10.2.3.4	3	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	1.350.000,00	0	0	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
46	1.3.2.10.2.3.4	4	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	1.350.000,00	0	0	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
47	1.3.2.10.2.3.4	5	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11	5.688.000,00	2	10	1.326.733,00	568.690,00	568.690,00	2.463.933,00	3.222.067,00
48	1.3.2.10.2.3.4	6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11	4.065.490,00	3	10	135.516,00	406.549,00	406.549,00	948.614,00	3.116.876,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
 Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Keperencanaan
Unit Organisasi : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASSET	NO. REG	NAMA ASSET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
49	1.3.2.10.2.3.4	7	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11 2021	4.065.490,00	3	10	135.516,00	406.549,00	406.549,00	948.614,00	3.116.876,00
50	1.3.2.10.2.3.4	8	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11 2021	4.065.490,00	3	10	135.516,00	406.549,00	406.549,00	948.614,00	3.116.876,00
51	1.3.2.10.2.3.4	9	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 2022	4.070.000,00	4	2	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	3.375.000,00
52	1.3.2.10.2.3.4	10	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 2022	4.070.000,00	4	2	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	3.375.000,00
53	1.3.2.10.2.3.17	1	External/ Portable Hardisk	12 2018	2.600.000,00	0	11	1.603.333,00	260.000,00	260.000,00	2.123.333,00	476.667,00
54	1.3.2.10.2.3.17	2	External/ Portable Hardisk	12 2018	2.600.000,00	0	11	1.603.333,00	260.000,00	260.000,00	2.123.333,00	476.667,00
55	1.3.2.10.2.3.17	3	External/ Portable Hardisk	12 2018	2.600.000,00	0	11	1.603.333,00	260.000,00	260.000,00	2.123.333,00	476.667,00
56	1.3.2.10.2.3.17	4	External/ Portable Hardisk	7 2019	2.412.500,00	1	6	1.206.250,00	241.250,00	241.250,00	1.688.750,00	723.750,00
57	1.3.2.10.2.3.17	5	External/ Portable Hardisk	7 2019	2.412.500,00	1	6	1.206.250,00	241.250,00	241.250,00	1.688.750,00	723.750,00
58	1.3.2.10.2.3.17	6	External/ Portable Hardisk	7 2019	2.412.500,00	1	6	1.206.250,00	241.250,00	241.250,00	1.688.750,00	723.750,00
59	1.3.2.10.2.3.17	7	External/ Portable Hardisk	3 2020	2.480.000,00	2	2	909.333,00	248.000,00	248.000,00	1.405.333,00	1.074.667,00
60	1.3.2.10.2.3.17	8	External/ Portable Hardisk	3 2020	2.480.000,00	2	2	909.333,00	248.000,00	248.000,00	1.405.333,00	1.074.667,00
61	1.3.2.10.2.3.18	1	Peralatan Personal Komputer lainnya	10 2014	64.300.000,00	0	0	64.300.000,00	0,00	0,00	64.300.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
 Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Kependudukan
 Unit Organisasi : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Sub Unit Organisasi : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 U P B : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SIASA MASA MAWPAAT Tahun/bulan	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
								Semester I	Semester II		
1. PERALATAN DAN MESIN											
1	1.3.2.51.4.1	1	Lemari Besi/Mezai	5 2010	2.779.250,00	0	2.779.250,00	0,00	0,00	2.779.250,00	0,00
2	1.3.2.51.4.1	2	Lemari Besi/Mezai	5 2010	2.779.250,00	0	2.779.250,00	0,00	0,00	2.779.250,00	0,00
3	1.3.2.51.4.1	3	Lemari Besi/Mezai	12 2010	2.779.250,00	0	2.779.250,00	0,00	0,00	2.779.250,00	0,00
4	1.3.2.51.4.1	4	Lemari Besi/Mezai	12 2010	2.779.250,00	0	2.779.250,00	0,00	0,00	2.779.250,00	0,00
5	1.3.2.51.4.1	5	Lemari Besi/Mezai	7 2012	3.400.000,00	0	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
6	1.3.2.51.4.1	6	Lemari Besi/Mezai	7 2012	3.400.000,00	0	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
7	1.3.2.51.4.1	7	Lemari Besi/Mezai	7 2012	3.400.000,00	0	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
8	1.3.2.51.4.1	8	Lemari Besi/Mezai	7 2012	3.400.000,00	0	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
9	1.3.2.51.4.3	1	Rak Besi	7 2012	9.500.000,00	0	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
10	1.3.2.51.4.3	2	Rak Besi	10 2012	1.930.000,00	0	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00
11	1.3.2.51.4.3	3	Rak Besi	9 2013	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
12	1.3.2.51.4.3	4	Rak Besi	9 2013	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
13	1.3.2.51.4.3	5	Rak Besi	9 2013	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
14	1.3.2.51.4.3	6	Rak Besi	9 2013	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
15	1.3.2.51.4.3	7	Rak Besi	9 2013	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
16	1.3.2.51.4.3	8	Rak Besi	9 2013	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
17	1.3.2.51.4.3	9	Rak Besi	9 2013	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
18	1.3.2.51.4.3	10	Rak Besi	9 2013	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
19	1.3.2.51.4.3	11	Rak Besi	9 2013	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
20	1.3.2.51.4.3	12	Rak Besi	9 2013	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
21	1.3.2.51.4.3	13	Rak Besi	11 2019	3.125.000,00	1	1.354.167,00	0,00	0,00	1.979.167,00	1.145.833,00
22	1.3.2.51.4.3	14	Rak Besi	11 2019	3.125.000,00	1	1.354.167,00	0,00	0,00	1.979.167,00	1.145.833,00
23	1.3.2.51.4.3	15	Rak Besi	11 2019	3.125.000,00	1	1.354.167,00	0,00	0,00	1.979.167,00	1.145.833,00
Jumlah										9.166.064,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
Sampai dengan 31-Dec-2022

Bidang : Bidang Kependudukan
 Unit Organisasi : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Sub Unit Organisasi : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 U P B : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASSET	NO. REG	NAMA ASSET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASAK		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2022	NILAI BUKU
						MAINFAT	Tahun Bekerja		Semester I	Semester II		
24	1.3.2.5.1.4.3	16	Rak Besi	11 2019	3.125.000,00	1	10	1.354.167,00	312.500,00	312.500,00	1.979.167,00	1.145.833,00
25	1.3.2.5.1.4.3	17	Rak Besi	11 2019	3.125.000,00	1	10	1.354.167,00	312.500,00	312.500,00	1.979.167,00	1.145.833,00
26	1.3.2.5.1.4.3	18	Rak Besi	11 2019	3.125.000,00	1	10	1.354.167,00	312.500,00	312.500,00	1.979.167,00	1.145.833,00
27	1.3.2.5.1.4.3	19	Rak Besi	11 2019	3.125.000,00	1	10	1.354.167,00	312.500,00	312.500,00	1.979.167,00	1.145.833,00
28	1.3.2.5.1.4.3	20	Rak Besi	11 2019	3.125.000,00	1	10	1.354.167,00	312.500,00	312.500,00	1.979.167,00	1.145.833,00
29	1.3.2.5.1.4.4	1	Rak Kayu	9 2014	9.000.000,00	0	0	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
30	1.3.2.5.1.4.4	13	Rak Kayu	12 2010	4.800.000,00	0	0	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
31	1.3.2.5.1.4.5	1	Filing Cabinet Besi	12 2009	1.638.000,00	0	0	1.638.000,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,00
32	1.3.2.5.1.4.5	2	Filing Cabinet Besi	5 2010	2.212.500,00	0	0	2.212.500,00	0,00	0,00	2.212.500,00	0,00
33	1.3.2.5.1.4.5	4	Filing Cabinet Besi	12 2010	2.212.500,00	0	0	2.212.500,00	0,00	0,00	2.212.500,00	0,00
34	1.3.2.5.1.4.5	6	Filing Cabinet Besi	8 2012	1.900.000,00	0	0	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
35	1.3.2.5.1.4.5	7	Filing Cabinet Besi	8 2012	1.900.000,00	0	0	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
36	1.3.2.5.1.4.5	8	Filing Cabinet Besi	8 2012	1.900.000,00	0	0	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
37	1.3.2.5.1.4.5	9	Filing Cabinet Besi	8 2012	1.900.000,00	0	0	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
38	1.3.2.5.1.4.5	10	Filing Cabinet Besi	7 2010	1.700.000,00	0	0	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
39	1.3.2.5.1.4.7	1	Bananas	12 2009	3.550.000,00	0	0	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00
40	1.3.2.5.1.4.27	1	Lemari Kaca	5 2010	2.857.000,00	0	0	2.857.000,00	0,00	0,00	2.857.000,00	0,00
41	1.3.2.5.1.4.27	2	Lemari Kaca	5 2010	4.130.000,00	0	0	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00
42	1.3.2.5.1.4.27	3	Lemari Kaca	12 2010	4.130.000,00	0	0	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00
43	1.3.2.5.1.4.27	4	Lemari Kaca	12 2010	4.130.000,00	0	0	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00
44	1.3.2.5.1.4.27	5	Lemari Kaca	12 2010	4.130.000,00	0	0	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00
45	1.3.2.5.1.4.27	6	Lemari Kaca	7 2012	4.300.000,00	0	0	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00
46	1.3.2.5.1.4.27	7	Lemari Kaca	7 2012	4.300.000,00	0	0	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00
47	1.3.2.5.1.4.27	8	Lemari Kaca	7 2012	4.300.000,00	0	0	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00
48	1.3.2.5.1.4.27	9	Lemari Kaca	7 2012	4.300.000,00	0	0	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Halaman 2 dari 3



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Keperhubungan
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MAUPUN TAHUN Badan	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
								Semester I	Semester II		



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2022	NILAI BUKU	
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II			
1. PERALATAN DAN MESIN													
1	1.3.2.5.1.5.2	1	CCTV - Camera Control Television System	9	2014	14.920.000,00	0	0	14.920.000,00	0,00	0,00	14.920.000,00	0,00
2	1.3.2.5.1.5.2	2	CCTV - Camera Control Television System	11	2022	12.439.000,00	1	10	0,00	0,00	1.036.583,00	11.402.417,00	0,00
3	1.3.2.5.1.5.5	1	White Board	9	2020	825.000,00	0	0	590.000,00	206.250,00	68.750,00	825.000,00	0,00
4	1.3.2.5.1.5.8	1	Copy Board/Electic White Board	9	2014	15.900.000,00	0	0	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	0,00
5	1.3.2.5.1.5.10	1	Akt Pengyancar Kertas	2	2017	5.200.000,00	0	0	5.113.333,00	86.667,00	0,00	5.200.000,00	0,00
6	1.3.2.5.1.5.12	1	Mesin Absensi	7	2014	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
7	1.3.2.5.1.5.33	1	Laser Printer	11	2022	1.500.000,00	1	10	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
8	1.3.2.5.1.5.39	1	Mesin Laminating	1	2020	1.100.000,00	0	0	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
9	1.3.2.5.1.5.75	1	Mesin Achatan	9	2014	32.300.000,00	0	0	32.300.000,00	0,00	0,00	32.300.000,00	0,00
10	1.3.2.5.1.5.75	2	Mesin Achatan	12	2022	15.000.000,00	1	11	0,00	0,00	625.000,00	14.375.000,00	0,00
11	1.3.2.5.1.5.76	1	Papan Nama Instansi	4	2010	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
12	1.3.2.5.1.5.76	2	Papan Nama Instansi	4	2010	500.000,00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
13	1.3.2.5.1.5.76	3	Papan Nama Instansi	12	2010	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
14	1.3.2.5.1.5.76	4	Papan Nama Instansi	12	2010	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
15	1.3.2.5.1.5.77	1	Papan Pengumuman	2	2015	2.400.000,00	0	0	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
16	1.3.2.5.1.5.81	1	Tertulis	9	2014	9.950.000,00	0	0	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00	0,00
17	1.3.2.5.1.5.81	2	Tertulis	9	2014	9.450.000,00	0	0	9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00	0,00

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Halaman 1 dari 1

Revisi: 1 dari 1



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASAK MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. PERALATAN DAN MESIN												
1	1.3.2.10.1.1.1	3	Hardware (Komputer Jaringan)	8 - 2014	19.840.000,00			19.840.000,00	0,00	0,00	19.840.000,00	0,00
					19.840.000,00	0	9	19.840.000,00	0,00	0,00	19.840.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Kepondokan
 Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. PERALATAN DAN MESIN												
					228.430.477,00			147.034.579,00	9.937.315,00	11.471.072,00	168.444.966,00	59.985.511,00
1	1.3.2.10.2.3.3	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.600.000,00	0	0	2.513.333,00	86.667,00	0,00	2.600.000,00	0,00
2	1.3.2.10.2.3.3	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.600.000,00	0	0	2.513.333,00	86.667,00	0,00	2.600.000,00	0,00
3	1.3.2.10.2.3.3	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	8.809.200,00	0	0	8.809.200,00	0,00	0,00	8.809.200,00	0,00
4	1.3.2.10.2.3.3	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.600.000,00	0	0	2.513.333,00	86.667,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5	1.3.2.10.2.3.3	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.600.000,00	0	0	2.513.333,00	86.667,00	0,00	2.600.000,00	0,00
6	1.3.2.10.2.3.3	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.200.000,00	0	0	1.833.333,00	220.000,00	146.667,00	2.200.000,00	0,00
7	1.3.2.10.2.3.3	9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2.893.000,00	0	0	2.893.000,00	0,00	0,00	2.893.000,00	0,00
8	1.3.2.10.2.3.3	10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2.500.000,00	1	6	1.296.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00	750.000,00
9	1.3.2.10.2.3.3	11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2.500.000,00	1	5	1.296.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00	750.000,00
10	1.3.2.10.2.3.3	12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2.500.000,00	1	5	1.296.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00	750.000,00
11	1.3.2.10.2.3.3	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2.500.000,00	1	6	1.296.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00	750.000,00
12	1.3.2.10.2.3.3	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2.500.000,00	1	6	1.296.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00	750.000,00
13	1.3.2.10.2.3.3	37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
14	1.3.2.10.2.3.3	38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
15	1.3.2.10.2.3.3	40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.925.000,00	0	0	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
16	1.3.2.10.2.3.3	41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	1.951.000,00	0	0	1.951.000,00	0,00	0,00	1.951.000,00	0,00
17	1.3.2.10.2.3.3	43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.300.000,00	0	0	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
18	1.3.2.10.2.3.3	44	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.300.000,00	0	0	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
19	1.3.2.10.2.3.3	45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.300.000,00	0	0	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
20	1.3.2.10.2.3.3	46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.300.000,00	0	0	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
21	1.3.2.10.2.3.3	53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.575.000,00	0	0	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00
22	1.3.2.10.2.3.3	54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.575.000,00	0	0	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00
23	1.3.2.10.2.3.3	55	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.575.000,00	0	0	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00
		56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.575.000,00	0	0	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Halaman 1 dari 1

Halaman 1 dari 1



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Sampai dengan 31-Dec-2022

Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASAKANIPALAT Tahun bulan	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2022	NILAI BUKU
								Semester I	Semester II		
24	1.3.2.10.2.3.3	57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.575.000,00	0	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00
25	1.3.2.10.2.3.3	58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
26	1.3.2.10.2.3.3	59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	3	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
27	1.3.2.10.2.3.3	60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
28	1.3.2.10.2.3.3	61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
29	1.3.2.10.2.3.3	62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
30	1.3.2.10.2.3.3	63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
31	1.3.2.10.2.3.3	64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
32	1.3.2.10.2.3.3	65	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2.453.000,00	2	572.367,00	245.300,00	245.300,00	1.062.967,00	1.390.033,00
33	1.3.2.10.2.3.3	66	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.787.500,00	3	464.583,00	278.750,00	278.750,00	1.022.083,00	1.765.417,00
34	1.3.2.10.2.3.3	67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.787.500,00	3	464.583,00	278.750,00	278.750,00	1.022.083,00	1.765.417,00
35	1.3.2.10.2.3.3	68	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.787.500,00	3	464.583,00	278.750,00	278.750,00	1.022.083,00	1.765.417,00
36	1.3.2.10.2.3.3	69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2.787.500,00	3	464.583,00	278.750,00	278.750,00	1.022.083,00	1.765.417,00
37	1.3.2.10.2.3.3	70	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	3.010.500,00	3	100.350,00	301.050,00	301.050,00	702.450,00	2.308.050,00
38	1.3.2.10.2.3.3	71	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	3.010.500,00	3	100.350,00	301.050,00	301.050,00	702.450,00	2.308.050,00
39	1.3.2.10.2.3.3	72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	3.010.500,00	3	100.350,00	301.050,00	301.050,00	702.450,00	2.308.050,00
40	1.3.2.10.2.3.3	73	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	3.010.500,00	3	100.350,00	301.050,00	301.050,00	702.450,00	2.308.050,00
41	1.3.2.10.2.3.3	74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	3.010.500,00	3	100.350,00	301.050,00	301.050,00	702.450,00	2.308.050,00
42	1.3.2.10.2.3.3	75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2.795.807,00	3	100.350,00	301.050,00	301.050,00	702.450,00	2.308.050,00
43	1.3.2.10.2.3.4	1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	1.350.000,00	0	0,00	0,00	0,00	605.758,00	2.190.049,50
44	1.3.2.10.2.3.4	2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	1.350.000,00	0	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
45	1.3.2.10.2.3.4	3	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	1.350.000,00	0	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
46	1.3.2.10.2.3.4	4	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	1.350.000,00	0	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
47	1.3.2.10.2.3.4	5	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11	5.686.000,00	2	1.326.733,00	568.600,00	568.600,00	2.463.933,00	3.222.067,00
48	1.3.2.10.2.3.4	5	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11	4.065.490,00	3	135.516,00	406.549,00	406.549,00	948.614,00	3.116.876,00

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

code: 19-2022



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : Dinas Perencanaan Modal dan Pelebaran Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Perencanaan Modal dan Pelebaran Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Perencanaan Modal dan Pelebaran Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MAWFALAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
49	1.3.2.10.2.3.4	7	Scanner (Peralatan Porsnal Komputer)	11 2021	4.005.490,00	3	10	138.316,00	406.549,00	406.549,00	948.614,00	3.116.876,00
50	1.3.2.10.2.3.4	8	Scanner (Peralatan Porsnal Komputer)	11 2021	4.665.490,00	3	10	135.516,00	406.549,00	406.549,00	948.614,00	3.116.876,00
51	1.3.2.10.2.3.4	9	Scanner (Peralatan Porsnal Komputer)	3 2022	4.650.000,00	4	2	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	3.375.000,00
52	1.3.2.10.2.3.4	10	Scanner (Peralatan Porsnal Komputer)	3 2022	4.050.000,00	4	2	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	3.375.000,00
53	1.3.2.10.2.3.17	1	Eksternal/ Portable Hardisk	12 2018	2.600.000,00	0	11	1.603.333,00	360.000,00	360.000,00	2.123.333,00	476.667,00
54	1.3.2.10.2.3.17	2	Eksternal/ Portable Hardisk	12 2018	2.600.000,00	0	11	1.603.333,00	360.000,00	360.000,00	2.123.333,00	476.667,00
55	1.3.2.10.2.3.17	3	Eksternal/ Portable Hardisk	12 2018	2.600.000,00	0	11	1.603.333,00	360.000,00	360.000,00	2.123.333,00	476.667,00
56	1.3.2.10.2.3.17	4	Eksternal/ Portable Hardisk	12 2018	2.600.000,00	0	11	1.603.333,00	360.000,00	360.000,00	2.123.333,00	476.667,00
57	1.3.2.10.2.3.17	5	Eksternal/ Portable Hardisk	7 2019	2.412.500,00	1	6	1.206.250,00	241.250,00	241.250,00	1.688.750,00	723.750,00
58	1.3.2.10.2.3.17	6	Eksternal/ Portable Hardisk	7 2019	2.412.500,00	1	6	1.206.250,00	241.250,00	241.250,00	1.688.750,00	723.750,00
59	1.3.2.10.2.3.17	7	Eksternal/ Portable Hardisk	7 2019	2.412.500,00	1	6	1.206.250,00	241.250,00	241.250,00	1.688.750,00	723.750,00
60	1.3.2.10.2.3.17	8	Eksternal/ Portable Hardisk	3 2020	2.480.000,00	2	2	999.333,00	248.000,00	248.000,00	1.405.333,00	1.074.667,00
61	1.3.2.10.2.3.18	1	Peralatan Porsnal Komputer Lainnya	10 2014	64.300.000,00	0	0	64.300.000,00	0,00	0,00	64.300.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Keperhubungan
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU	
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II			
1. PERALATAN DAN MESIN													
1	1.3.2.16.21.12	1	Hard Disk	12	2018	4.200.000,00	0	11	3.728.233,00	912.100,00	912.100,00	5.562.433,00	3.558.567,00
2	1.3.2.16.21.12	2	Hard Disk	11	2020	1.561.000,00	2	10	364.233,00	420.000,00	420.000,00	3.430.000,00	770.000,00
3	1.3.2.16.21.12	3	Hard Disk	11	2020	1.660.000,00	2	10	392.000,00	156.100,00	156.100,00	676.433,00	884.567,00
4	1.3.2.16.21.12	4	Hard Disk	11	2020	1.660.000,00	2	10	392.000,00	168.000,00	168.000,00	728.000,00	952.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Sempai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
U P B : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASAK		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
						MANIFAK	Tahur/ bulan		Semester I	Semester II		
1. PERALATAN DAN MESIN												
1	1.3.2.10.2.4.1	1	Server	12 - 2010	59.900.000,00	0	0	59.900.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	121.155.531,00	14.323.841,00
2	1.3.2.10.2.4.1	2	Server	12 - 2018	74.800.000,00	0	11	46.126.667,00	7.480.000,00	7.480.000,00	61.086.667,00	13.713.333,00
3	1.3.2.10.2.4.4	4	Modem	12 - 2021	779.372,00	3	11	0,00	0,00	168.864,00	168.864,00	616.508,00
					135.479.372,00			106.026.667,00	7.480.000,00	7.648.864,00	121.155.531,00	14.323.841,00

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Halaman 1 dari 1

Halaman 1 dari 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa implementasi SAP dimulai pada tahun 2015. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan audited atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi pada pemerintah daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut SKPD dalam hal ini Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) wajib menyusun laporan keuangan SKPD yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan.

Maksud disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas akuntansi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penemuan periode berjalan untuk membiayai;
- b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai sumber daya dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas akuntansi.

Adapun komponen laporan keuangan yang wajib disajikan adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca;
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
32. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
33. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.
34. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
35. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

36. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 114 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
37. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
 - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI**
 - 3.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
 - 4.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.2. Neraca
 - 4.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 4.4. Laporan Operasional (LO)
- BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**
- BAB VI PENUTUP**

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi capaian kinerja keuangan belanja Tahun 2022 adalah sebesar Rp **6.764.988.600,00** atau sebesar 96,4% dari pagu sebesar Rp **7.017.727.904,00**. Rincian realisasi belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH (KURANG)
		(RP)	%	
BELANJA	7.017.727.904,00	6.764.988.600,00	96,4	252.739.304,00
BELANJA OPERASI	6.499.664.954,00	6.276.745.850,00	96,57	222.919.104,00
Belanja Pegawai	3.818.515.572,00	3.682.364.117,00	96,43	136.151.455,00
Belanja Barang dan Jasa	2.681.149.382,00	2.594.381.733,00	96,76	86.767.649,00
BELANJA MODAL	518.062.950,00	488.242.750,00	94,24	29.820.200,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	508.062.950,00	478.742.750,00	94,23	29.320.200,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	9.500.000,00	95	500.000,00

Jumlah anggaran dan realisasi anggaran menurut program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2022

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.336.681.250,00	5.135.230.070,00	96,23
2.18.01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.868.300,00	39.038.130,00	95,52
2.18.01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.358.200,00	25.000.280,00	94,85
2.18.01 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.421.100,00	7.221.100,00	97,30
2.18.01 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.089.000,00	6.816.750,00	96,16
2.18.01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.868.577.372,00	3.729.275.853,00	96,40

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.859.515.172,00	3.719.883.653,00	96,41
2.18.01 2.02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.421.100,00	6.751.100,00	90,97
2.18.01 2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2.641.100,00	2.641.100,00	100,00
2.18.01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.750.000,00	40.750.000,00	100,00
2.18.01 2.05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribul Kelengkapannya	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
2.18.01 2.05 05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00
2.18.01 2.05 10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00
2.18.01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.287.460,00	441.560.825,00	99,17
2.18.01 2.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.588.960,00	78.853.750,00	96,65
2.18.01 2.06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.618.720,00	5.400.000,00	96,11
2.18.01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	227.100.360,00	227.027.180,00	99,97
2.18.01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan	44.298.400,00	44.120.552,00	99,60
2.18.01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.900.000,00	16.400.000,00	97,04
2.18.01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	69.761.000,00	69.759.343,00	100,00
2.18.01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	455.856.250,00	429.489.000,00	94,22
2.18.01 2.07 01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	333.907.200,00	312.200.000,00	93,50
2.18.01 2.07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.948.050,00	82.289.000,00	94,64
2.18.01 2.07 08	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
2.18.01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	355.123.810,00	327.386.849,00	92,19
2.18.01 2.08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	490.000,00	60.000,00	12,24
2.18.01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.310.000,00	73.767.827,00	74,28
2.18.01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.323.810,00	253.558.822,00	99,31
2.18.01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.239.058,00	127.729.613,00	98,07
2.18.01 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.552.600,00	30.517.154,00	99,88

DINAS PEMANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.216.458,00	36.321.459,00	95,04
2.18.01 2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.560.000,00	48.106.000,00	99,07
2.18.01 2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.910.000,00	12.785.000,00	99,03
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	261.284.000,00	260.534.000,00	99,71
2.18.02 2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	108.815.000,00	108.816.000,00	100,00
2.18.02 2.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengensi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanam Modal	68.466.000,00	68.466.000,00	100,00
2.18.02 2.01.02	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	42.149.000,00	42.149.000,00	100,00
2.18.02 2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Invenstasi Kabupaten/Kota	152.869.000,00	151.919.000,00	99,51
2.18.02 2.02.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	60.342.000,00	60.342.000,00	100,00
2.18.02 2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	92.327.000,00	91.577.000,00	99,19
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	123.095.400,00	116.335.400,00	94,51
2.18.03 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	123.095.400,00	116.335.400,00	94,51
2.18.03 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	42.793.400,00	39.648.400,00	92,65
2.18.03 2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	80.302.000,00	76.687.000,00	95,50
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	712.087.470,00	670.637.140,00	94,18
2.18.04 2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	712.087.470,00	670.637.140,00	94,18
2.18.04 2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	550.200.000,00	509.000.000,00	92,51
2.18.04 2.01.02	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	94.750.000,00	94.500.000,00	99,74
2.18.04 2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap	33.882.570,00	33.882.570,00	100,00

	Nonperizinan			
2.18.04 2.01 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	33.254.900,00	33.254.570,00	100,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	503.491.764,00	501.466.470,00	99,60
2.18.05 2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	503.491.764,00	501.466.470,00	99,60
2.18.05 2.01 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
2.18.05 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	348.733.600,00	347.233.380,00	99,57
2.18.05 2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	147.558.164,00	147.033.090,00	99,64
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	81.088.020,00	80.785.520,00	99,63
2.18.06 2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.088.020,00	80.785.520,00	99,63
2.18.06 2.01 01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	81.088.020,00	80.785.520,00	99,63
	Jumlah	7.017.727.904,00	6.764.988.600,00	96,40

Hasil pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022

N O	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan, Pelayanan Administrasi Perkantoran yang menunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Perencanaan Kinerja, Keuangan dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100

1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA, Rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA	5 Dokumen	8 Dokumen	160
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPMPSP yang Disusun	6 Laporan	6 Laporan	100
3.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPSP Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	1 Laporan	1 Laporan	100
c.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Paket	1 Paket	100
2.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai SKPD yang di Monitoring, Evaluasi dan Dinilai (Reward ASN / SKP)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraluran Perundang-Undangan	Jumlah Pembelajaran di Kantor Sendiri (In House Training) yang Diadakan	150 Orang	150 Orang	100
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Barang dan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi yang Dikelola Dengan Baik	100%	100%	100
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	100
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9 Paket	9 Paket	100
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45 paket	45 paket	100
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Paket	8 Paket	100
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	5 Dokumen	100
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dihadiri	43 Laporan	43 Laporan	100

7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dihadiri	36 Laporan	36 Laporan	100
e.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemanuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Pelayanan Administrasi yang Dilakukan Dengan Baik	22 Unit	22 Unit	100
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	20 Unit	20 Unit	100
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	1 unit	1 unit	100
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilakukan Dengan Baik	100%	100%	100
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan	7 Laporan	100
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan / Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	87 Unit	87 Unit	100
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	100
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68 Unit	68 Unit	100
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	8 Unit	100
ii.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penanaman Modal	18%	18%	100
a.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	2 Dokumen	100

1.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanam Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2.	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	100
b.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Invenstasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Peta Potensi Investasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Calon Investor yang Beraudensi Ke PEMDA	2 Investor	2 Investor	100
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal	3 Kali dengan 2 Strategi	3 Kali dengan 2 Strategi	100
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran/ Promosi Digital yang di ikuti	1 Dokumen	1 Dokumen	100
IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Nonperizinan	85%	87%	102
a.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal	85%	87%	102
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang di proses	6400 Pelaku Usaha	5,044 Pelaku Usaha	79
2.	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha	260 Kegiatan Usaha	433
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	850 Orang	1,229 Orang	144

4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5 kegiatan Usaha	23 Kegiatan Usaha	460
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tambahan Realisasi Investasi (Tahunan)	Rp 1.151.181.887.021	Rp 1.026.552.486.011,-	89.17
		Jumlah Investor	323 Pelaku Usaha	361 Pelaku Usaha	111
a.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Perproyek yang Dipantau, Dibina dan Diawasi	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi/Bimtek, Laporan Kegiatan dan jumlah peserta	240 Pelaku Usaha	360 Pelaku Usaha	150
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Proyek dan Profil Pelaku Usaha Hasil Pengawasan	15 Kegiatan Usaha	49 Kegiatan Usaha	326
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Jenis Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (digital/elektronik, Buku/Manual)	10 Informasi Digital dan 40 Buku/Manual	10 Informasi Digital dan 40 Buku/Manual	100
a.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Laporan Pelayanan Informasi/Konsultasi/Pendampingan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik belum dapat terpenuhi sesuai standar
2. Berubahnya regulasi terkait Penanaman Modal dan Perizinan
3. Kecamatan dan Desa belum optimal akan potensi sektoral wilayahnya masing-masing
4. Belum terorganisasi dalam pemberian insentif/ fasilitas Penanaman Modal

5. Masih banyak pelaku usaha belum paham dan tertib terhadap kewajibannya menyampaikan LKPM pada aplikasi OSS RBA
6. Belum optimalnya media informasi khusus untuk Mal Pelayanan Publik

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis "terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan", antara lain :

1. Bersama SKPD terkait memperbaiki peraturan terkait dan standar pelayanan (SP) Perizinan dan Non perizinan;
2. Melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan terkait dan standar pelayanan (SP) Perizinan dan Nonperizinan.
3. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi perizinan bersama dengan SKPD Teknis terkait guna pemenuhan komitmen dan kesesuaian izin yang telah diterbitkan.
4. Memberi ruang bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme melalui pola *corporate university*.
5. Melaksanakan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyatukan persepsi
6. Mengupayakan penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional dan profesional.
7. Meningkatkan persamaan visi, misi keterkaitan antar SKPD yang berorientasi pada kepuasan dan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti masih adanya syarat-syarat pendukung dalam pembuatan perizinan.
8. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas IT (Server dan jaringan internet).
9. Mengusulkan penambahan pegawai/staf teknis yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan;
10. Mensinergikan SOP DPMPSTSP dengan SOP pada OPD Teknis terkait/ SOP terintegrasi pada proses pelayanan perizinan dan nonperizinan;

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan entitas akuntansi meliputi beberapa asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

a. **Asumsi Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti entitas akuntansi di anggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. **Asumsi Kesenambungan Entitas**

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. **Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)**

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah daerah adalah **basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional**. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/fasing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan

dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan yang dibenarkan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja	7.017.727.904,00	6.764.988.600,00
1.1 Belanja Operasi	6.499.664.954,00	6.276.745.850,00

4.1.1. Belanja Operasi

Realisasi/penyerapan Belanja Operasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 6.276.745.850,00 atau sekitar 96,57% dan jumlah anggaran tahun 2022 yang tersedia yaitu sebesar Rp. 6.499.664.954,00. Rincian realisasi/penyerapan belanja operasi tahun 2022 lebih lengkapnya dapat dilihat melalui uraian perincian sebagai berikut :

A. Belanja Pegawai

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	3.818.515.572,00	3.682.364.117,00

Jumlah anggaran dan realisasi tersebut terdiri dari :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
- Belanja Gaji Pokok ASN	1.259.518.600,00	1.233.597.200,00
- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	126.725.726,00	122.823.758,00
- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	108.430.000,00	108.430.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional ASN	78.840.000,00	75.600.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.615.000,00	18.060.000,00
- Belanja Tunjangan Beras ASN	75.988.580,00	73.361.460,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.867.853,00	3.867.853,00
- Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.899,00	17.149,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	117.046.460,00	112.899.838,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.752.543,00	2.688.114,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.002.203,00	7.802.907,00
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.028.570,00	0
- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	2.011.702.138,00	1.923.217.839,00
Jumlah Belanja Pegawai	3.818.515.572,00	3.682.364.117,00

B. Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	2.681.149.382	2.594.381.733,00

Jumlah anggaran dan realisasi tersebut terdiri dari :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	89.780.360,00	89.731.180,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	157.420.554,00	156.273.832,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32.803.810,00	31.578.822,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	451.620.000,00	449.220.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	22.000.000,00	22.000.000,00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.450.000,00	39.450.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	120.800.000,00	119.747.500,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	688.400.000,00	644.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	244.800.000,00	244.800.000,00
- Belanja Jasa konversi Aplikasi/Sistem Informasi	35.000.000,00	35.000.000,00
- Belanja Tagihan Telepon	2.500.000,00	2.472.561,00
- Belanja Tagihan Air	11.820.000,00	5.165.800,00
- Belanja Tagihan Listrik	84.990.000,00	66.129.466,00
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.900.000,00	6.900.000,00
- Belanja Paket Pengiriman	490.000,00	60.000,00
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.056.458,00	2.200.300,00
- Belanja Lembur	24.400.000,00	22.590.000,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	34.062.000,00	33.597.516,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.974.000,00	1.743.120,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.963.600,00	2.178.900,00
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.800.000,00	1.800.000,00
- Belanja Sewa Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	27.350.000,00
- Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	8.640.000,00	8.515.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	64.712.600,00	64.638.313,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000,00	4.270.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29.930.000,00	29.849.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	18.630.000,00	18.257.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	209.411.000,00	207.638.423,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	238.025.000,00	236.725.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	2.681.149.382,00	2.594.381.733,00

4.1.2. Belanja Modal

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	518.062.950,00	488.242.750,00

Belanja Modal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun anggaran 2022 dapat dilihat Jumlah realisasi penyerapan dana yang telah dicapai yaitu sebesar Rp. 488.242.750,00 atau sekitar 94,24 % dari

jumlah anggaran yang tersedia pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 518.062.950,00, dengan perincian belanja sebagai berikut :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
- Belanja Modal Alat Angkutan	333.907.200	312.200.000
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.118.720	21.900.000
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	47.948.050	43.389.000
- Belanja Modal Komputer	81.588.980	78.853.750
- Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	22.500.000	22.400.000
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.000.000	9.500.000
Jumlah Belanja Modal	518.062.950	488.242.750

Berdasarkan rincian belanja di atas, adapun rincian belanja yang dimaksud berdasarkan realisasi belanja modal yakni sebagai berikut .

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
- Belanja Modal Alat Angkutan	333.907.200,00	
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		312.200.000,00
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang		312.200.000,00
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.118.720,00	
Belanja Modal Alat Kantor		16.250.000,00
- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		1.250.000,00
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		15.000.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga		5.850.000,00
- Belanja Modal Alat Dapur		1.080.000,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		4.570.000,00
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	47.948.050,00	
Belanja Modal Alat Studio		43.389.000,00
- Belanja Modal Peralatan Studio Audio		3.000.000,00
- Belanja Modal Alat Studio Lainnya		40.389.000,00
Belanja Modal Komputer	81.588.980,00	
Belanja Modal Komputer Unit		70.753.750,00
- Belanja Modal Personal Computer		70.753.750,00
Belanja Modal Peralatan Komputer		8.100.000,00
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer		8.100.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	22.500.000,00	
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		22.400.000,00
- Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Lainnya		22.400.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.000.000,00	
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak		9.500.000,00
- Belanja Modal Buku Umum		9.500.000,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	518.062.950,00	488.242.750,00

4.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

4.2.1. Aset Lancar

	<u>TAHUN 2022 (Rp)</u>	<u>TAHUN 2021 (Rp)</u>
Aset		
Aset Lancar	886.343.668,34	639.732.614,18

Jumlah Aset Lancar Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp. **886.343.668,34** dan Rp. **639.732.614,18** yang terdiri dari :

	<u>TAHUN 2022 (Rp)</u>	<u>TAHUN 2021 (Rp)</u>
- Beban Dibayar Dimuka	-	30.710.382,51
- Persediaan	13.430.620,00	11.832.990,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah nilai dari persediaan bahan pakai habis/material yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Dengan rincian sebagai berikut :

	<u>TAHUN 2022 (Rp)</u>	<u>TAHUN 2021 (Rp)</u>
- Persediaan	13.430.620,00	11.832.990,00
Alat Tulis Kantor	390.000,00	3.794.670,00
Barang Cetak	13.040.620,00	8.038.320,00

(Rincian Persediaan dan BA pemeriksaan persediaan terlampir).

4.2.2. Aset Tetap

	<u>TAHUN 2022 (Rp)</u>	<u>TAHUN 2021 (Rp)</u>
Aset Tetap	797.142.215,00	530.860.075,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari :

	<u>TAHUN 2022 (Rp)</u>	<u>TAHUN 2021 (Rp)</u>
- Peralatan dan Mesin	3.121.237.730,00	2.628.459.680,00
- Gedung dan Bangunan	-	-
- Jalan, Irigasi dan Jembatan	-	-
- Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	-
- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
- Akumulasi Penyusutan	-2.333.595.515,00	-2.097.599.605,00
Jumlah Aset Tetap	797.142.215,00	530.860.075,00

(Rincian Aset dari Akun Aset Tetap terlampir)

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing bernilai sebesar Rp. **797.142.215,00** dan Rp. **530.860.075,00**, yang merupakan total nilai dari aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Pada tahun 2022 jumlah aset tetap meningkat sebesar Rp. **266.282.140,00** atau meningkat sekitar **33,40 %** bila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Adapun meningkatnya total nilai aset tetap sebagaimana dimaksud diuraikan pada rincian berikut ini.

1. Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2022 jumlah Peralatan dan mesin yang direalisasikan antara lain terdiri dari Belanja Modal Alat Angkutan yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 312.200.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 333.907.200,00 atau sekitar 93,50 %, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp 21.900.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 22.118.720,00 atau sekitar 99,01 %, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terealisasi sebesar Rp. 43.389.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 47.948.050,00 atau sekitar 90,49%, Belanja Modal Komputer terealisasi sebesar Rp. 78.853.750,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 81.588.980,00 atau sekitar 96,65%, Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi terealisasi sebesar Rp. 22.400.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 22.500.000,00 atau sekitar 99,56%, Belanja Modal Bahan Perpustakaan terealisasi sebesar Rp. 9.500.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau sekitar 95,00% hal ini disebabkan karena faktor penambahan anggaran belanja modal di tahun 2022 untuk sarana dan prasarana Gedung Mali Pelayanan Publik serta tidak terdapat penerimaan pendapatan pada kegiatan operasional SKPD baik dalam bentuk PAD, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jika dilihat selisih antara jumlah realisasi peralatan mesin tahun 2022 dengan jumlah nilai akumulasi kekayaan Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.628.459.680,00 dengan tahun 2022 sebesar Rp. 3.121.237.730,00 terjadi peningkatan aset sebesar Rp. 492.778.050,00 atau sekitar 18,75 %. Selisih peningkatan jumlah nilai kekayaan peralatan dan mesin pada tahun 2022 ini disebabkan terjadinya realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk tahun 2022 sebesar Rp. 478.742.750,00 disertai dengan adanya hibah masuk sebesar Rp. 17.528.500,00, selain itu terdapat mutasi aset tetap peralatan dan mesin yang direklasifikasi ekstrakompatible sebesar Rp. 1.410.000,00 dan reklasifikasi barang dan jasa sebesar Rp. 2.083.200,00, adapun daftar dari nilai belanja modal peralatan dan mesin, barang hibah, reklasifikasi ekstrakompatible dan reklasifikasi barang dan jasa terdapat pada daftar yang terlampir terlampir.

2. Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2022 dan 2021 jumlah realisasi anggaran untuk Gedung dan bangunan sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0%.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2022 dan 2021 jumlah realisasi anggaran untuk belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0%

4. Aset Tetap Lainnya

Pada tahun 2022 jumlah realisasi anggaran untuk belanja aset tetap lainnya sebesar **Rp.9.500.00,00** atau sebesar **95,00%** dan di tahun 2021 tidak terdapat belanja aset tetap lainnya.

5. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan untuk Aset tetap pada tahun 2022 sebesar **Rp. 2.333.595.515,00**, dimana akumulasi penyusutan untuk aset tetap pada tahun 2022 sebesar **Rp. 235.995.910,00**, dan jika dibandingkan dengan akumulasi penyusutan untuk aset tetap pada tahun 2021 sebesar **Rp. 459.610.545,00** mengalami penurunan sebesar **Rp. 223.614.635,00** dari tahun 2021 yang berjumlah sebesar **Rp. 2.097.599.605,00**.

Akumulasi penyusutan tahun 2022 yang dimaksud merupakan nilai dari penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 2.333.595.515**, nilai ini didapat dari nilai akumulasi penyusutan per 1 Januari 2022 sebesar **Rp. 2.097.599.605,00** ditambah penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 235.995.910,00**

4.2.3. Aset Lainnya

	<u>TAHUN 2022 (Rp)</u>	<u>TAHUN 2021 (Rp)</u>
Aset Lainnya	75.770.833,34	66.329.166,67

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 yang terdiri dari belanja modal aset tidak berwujud untuk pengadaan sistem komputerisasi dan jumlah aset lain-lain dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut :

	<u>TAHUN 2022 (Rp)</u>	<u>TAHUN 2021 (Rp)</u>
- Aset Tidak Berwujud	634.182.000,00	96.400.000,00
- Aset Lain-Lain	-	-
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	558.411.166,66	30.070.833,33
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Aset Lainnya	75.770.833,34	66.329.166,67

1. Nilai aset tidak berwujud tahun 2022 dan tahun 2021 masing-masing sebesar **Rp. 634.182.000,00** dan **Rp. 96.400.000,00** dimana nilai aset tetap mengalami perubahan dari tahun 2021 karena adanya belanja aset tidak berwujud ditahun 2022. dengan nilai aset tidak berwujud tersebut maka akumulai amortisasi dari amortisasi sebesar **Rp. 558.411.166,66** sampai dengan per 31 Desember 2022.
2. Sedangkan nilai aset lain-lain untuk tahun 2022 dan tahun 2021 tidak mengalami perubahan sebesar **Rp. 0,00** karena terjadi penghapusan.

4.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

4.3.1. Pendapatan - LO

URAIAN	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
--------	------	------	-------------------------	---

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	0	0	100
Pendapatan Transfer	0	0	0	100
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.528.500,00	0	17.528.500,00	100

Berdasarkan data di atas pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdapat pendapatan operasional yang didapat oleh DPMPTSP dalam bentuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 17.528.500,00.

4.3.2. Beban

Jumlah beban operasi pada tahun 2022 dan tahun 2021 masing-masing sebesar Rp. 6.518.377.545,84 dan Rp. 6.530.586.152,49, dimana jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama tahun 2022 dan tahun 2021. Adapun rincian beban operasional tersebut sebagai berikut:

	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
BEBAN	6.535.906.045,84	6.530.586.152,49	5.319.893,35	100,1
BEBAN OPERASI	6.274.351.802,51	4.761.856.633,49	1.512.495.169,02	131,8
Beban Pegawai	3.682.384.117,00	2.979.266.767,00	703.097.350,00	123,6
Beban Barang dan Jasa	2.590.577.685,51	1.782.589.866,49	807.987.819,02	145,3
Beban Bunga	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang	0	0	0	0
Beban Lain-Lain	1.410.000,00	0	1.410.000	0
Jumlah Beban Operasi	6.274.351.802,51	4.761.856.633,49	1.512.495.169,02	131,8
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	261.554.243,33	172.077.946,00	89.476.297,33	152
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	235.995.910,00	147.977.946,00	88.017.964,00	159,5
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lainnya	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25.558.333,33	24.100.000,00	1.458.333,33	106,1
Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi	261.554.243,33	172.077.946,00	89.476.297,33	152
BEBAN TRANSFER	0	0	0	0
Beban Bagi Hasil	0	0	0	0
Beban Bantuan Keuangan	0	0	0	0
Jumlah Beban Transfer	0	0	0	0
BEBAN TAK TERDUGA	0	0	0	0
Beban Tak Terduga	0	0	0	0

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jumlah Beban Tak Terduga	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN	6.535.906.045,84	4.933.934.579,49	1.601.971.466,35	132,5
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	-6.518.377.545,84	-4.933.934.579,49	-1.584.442.966,35	132,1
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
SURPLUS NON OPERASIONAL	0	0	0	0
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Surplus Non Operasional	0	0	0	0
DEFISIT NON OPERASIONAL	0	1.596.651.573,00	-1.596.651.573,00	0
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1.596.651.573,00	-1.596.651.573,00	0
Jumlah Defisit Non Operasional	0	1.596.651.573,00	-1.596.651.573,00	0
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	1.596.651.573,00	-1.596.651.573,00	0
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-6.518.377.545,84	-4.933.934.579,49	-1.584.442.966,35	132,1
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
PENDAPATAN LUAR BIASA	0	0	0	0
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0
BEBAN LUAR BIASA	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Jumlah Beban Luar Biasa	0	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/ DEFISIT - LO	-6.618.377.545,84	-6.530.586.152,49	12.208.606,65	0

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi belanja juga berpengaruh dengan meningkatnya akun beban. Realisasi beban belanja operasional Pada tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi beban belanja operasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.512.495.169,02 atau meningkat sekitar 1,76 %. Adapun berdasarkan data di atas

penurunan realisasi beban operasional yang terjadi pada tahun 2022 di pengaruhi oleh meningkatnya dan menurunnya beberapa realisasi beban belanja antara lain sebagai berikut :

- a. Perbandingan nilai Realisasi beban belanja pegawai pada tahun 2022 dan 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 703.097.350,00 atau sebesar 3,6 % dengan masing-masing nilai realisasi beban belanja pegawai tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp 3.682.364.117,00. dan Rp. 2.979.266.767,00. Peningkatan realisasi beban belanja pegawai disebabkan oleh Kenarikan bentuk uang maupun bentuk barang yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal seperti kenaikan beban belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
- b. Untuk realisasi beban belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 807.987.819,02 atau sekitar 5,33 % bila dibandingkan tahun 2021 dengan masing-masing realisasi sebesar Rp. 1.741.932.264,00 untuk tahun 2022 dan Rp. 2.590.577.685,51. Adapun rincian dari realisasi beban belanja barang dan jasa antara lain yaitu:

URAIAN	Tahun 2022
Beban Barang dan Jasa	2.590.577.685,51
Persediaan tahun 2021	11.832.990,00
Beban Bahan Pakai Habis	764.303.834,00
Beban Sewa 2021	30.710.382,51
Reklasifikasi dari KIB B ke Barang dan Jasa	2.083.200,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	37.519.536,00
Beban Jasa Kantor	1.188.515.627,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29.150.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00
Beban Pemeliharaan, peralatan dan mesin	125.529.313,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	444.363.423,00
Pengurang :	
Kapitalisasi/Atribusi Belanja Non Modal	35.000.000,00
Persediaan tahun 2022	13.430.620,00

URAIAN	Tahun 2022
Beban Penyusutan dan Amortisasi	261.554.243,33
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	235.995.910,00

- Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	235.995.910,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	24.100.000,00
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25.558.333,33

- d. Sedangkan pada akun beban transfer dan beban tak terduga yang tertera pada laporan operasional tahun 2022 tidak terjadi perubahan.

4.3.3. Kegiatan Non Operasional

URAIAN	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Surplus/defisit kegiatan non operasional	0	0	0	100

Untuk tahun 2022 tidak terdapat penurunan ataupun kenaikan defisit kegiatan operasional lainnya.

4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	-9.383.268.197,82	-2.852.682.045,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	-6.518.377.545,84	-6.530.586.152,49
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
LAIN-LAIN	0	0
EKUITAS AKHIR	-15.901.645.743,66	-9.383.268.197,82

Berdasarkan data Laporan Perubahan Ekuitas di atas dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Nilai ekuitas awal pada tahun anggaran 2022 berasal dari nilai saldo akhir tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 2021 sebesar defisit Rp. 9.383.268.197,82.
2. Pada tahun 2022 DPMPTSP mengalami pengurangan defisit sejumlah Rp. 6.518.377.545,84 dibandingkan tahun 2021 DPMPTSP mengalami defisit sebesar Rp. 6.530.586.152,49, dimana jumlah per 31 Desember 2022 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan Laporan Operasional
3. Pada tahun anggaran 2022 dan tahun 2021 nilai ekuitas akhir masing-masing sebesar defisit Rp. 15.901.645.743,66 dan Rp. 9.383.268.197,82 dimana pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai ekuitas akhir sebesar Rp. 6.518.377.545,84 atau sekitar 40,99 % yang dikarenakan meningkatnya beban operasi, defisit dari kegiatan non operasional serta tidak terdapat penerimaan pendapatan pada tahun 2022 yang berpengaruh pada bertambahnya nilai defisit pada tahun 2022.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Informasi Tambahan

Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada pasal 1 ayat 4 yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, sedangkan pada ayat 5 Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan PTSP menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yaitu :

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- c. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

2. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

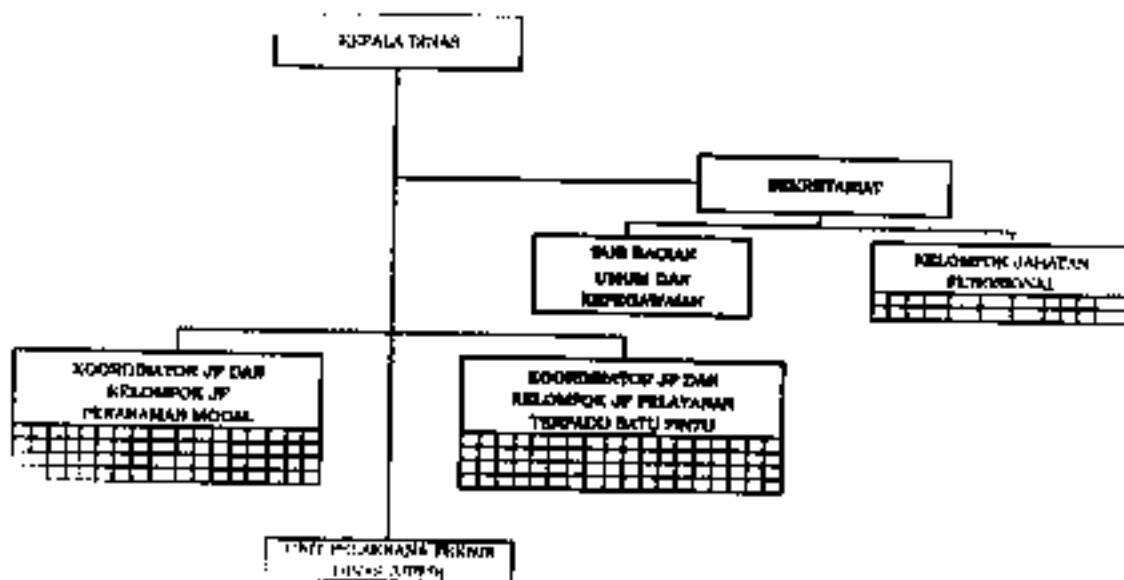
5.2 Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka melaksanakan 2 (dua) program kerja dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dibentuklah sebuah Dinas dengan nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi sebagai berikut .

1. Penyusunan program kegiatan kerja di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
7. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut tugas dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya yaitu :

1. Kepala Dinas

a. Tugas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan menyelenggarakan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas;
4. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
2. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pengendalian kegiatan di Dinas;
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh alasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

a. Tugas

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian

b. Fungsi

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum dan kepegawaian;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang umum dan kepegawaian.
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian. dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. Tugas :

Metaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu;
- b. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari koordinator kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdin dari kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI PENUTUP

Sebagai penutup Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
2. Jumlah belanja sebesar Rp. 7.017.727.904,00 terealisasi sebesar Rp 6.764.988.600,00 atau sebesar 96,4%;
3. Untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 6.499.664.954,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 518.062.950,-, dan total Belanja Operasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 3.818.515.572,- dan Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 2.681.149.382,-, dari Belanja Modal tersebut terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 508.062.950,- dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 10.000.000,-;
4. Sisa pagu anggaran belanja Rp. 252.739.304,00,- atau sebesar 3,66 %.
5. Untuk kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penyesuaian situasi dan kondisi yang ada. Sekalipun tidak terlepas dari kendala dan permasalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan ini, kerja keras dan koordinasi dalam mempersiapkan data yang ada membuat laporan keuangan ini dapat tersaji. Bertitik tolak dari semangat kerja tinggi dan kerjasama yang baik selama ini, diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan selanjutnya dapat lebih lancar sehingga mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas, akuntabel serta memenuhi tujuan transparansi menuju *good governance* yang dicita-citakan.